

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) PADA PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA**

(Suatu Studi di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)

Oleh : Junadi

DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Lettu Suyitno No.2 Desa Kalirejo Kec.Bojonegoro
Email : junadijun@yahoo.com

Abstract

The village head is the leader and penanggungjawab in holding village government, the implementation of development and social development. In the structures of governance in Indonesia, the village is the lowest form of government territory. Based on the study of history, the village is the oldest Autonomous Region. The village was founded before the advent of greater coordination area and before the birth of the States (the Kingdom), therefore, the village has the right of full autonomy. It does not contain the power of government in the narrow sense, but also contains a rule in the broad sense, because the village had power over the courts, legislation, policing and defense. So the village area has a very comprehensive autonomous regions established larger in the future.

Success in Rural development is needed the active participation of all sections of society which is the core village building the village. After a period of reform is felt that active role in community development is somewhat reduced, even understanding the participation put forward to highlight the weaknesses and errors of government administration which were carried by the demonstrations and protests that led to the form of anarchism, not how to find a solution in a democratic solution. More democratic understanding defined as the freedom to perform actions without thinking consequences and can harm others.

Community empowerment programs have been formulated by the government in order to encourage the growth of developing active community participation, one of which is the program of the Village Fund Allocation (ADD) as a form of sustainability and improvement of Presidential Instruction Program in Rural Development (Inpres Bangdes).

Keyword: *Village Head, Empowerment, Institute of Rural Community Empowerment (LPMD)*

ABSTRACT

Kepala Desa merupakan pemimpin dan penanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pada struktur tata pemerintahan di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah Otonom yang paling tua. Desa didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya Negara-Negara (Kerajaan) oleh karena itu, desa mempunyai hak otonomi penuh. Kekuasaan itu tidak

berisi pemerintahan dalam arti sempit, akan tetapi juga berisi pemerintahan dalam arti luas, sebab desa juga berkuasa atas pengadilan, perundang-undangan, kepolisian dan juga pertahanan. Jadi daerah desa mempunyai otonom yang sangat luas dari daerah-daerah yang lebih besar yang didirikan dikemudian hari.

Keberhasilan dalam pembangunan Desa sangat dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat Desa yang merupakan inti pembangunan Desa. Setelah masa reformasi dirasakan bahwa peran aktif masyarakat dalam pembangunan agak berkurang, bahkan pemahaman partisipasi lebih dikedepankan untuk menyoroti berbagai kelemahan dan kesalahan dari penyelenggara pemerintahan yang diaktualisasikan dengan demonstrasi dan protes yang mengarah pada bentuk anarkisme, bukan bagaimana mencari solusi pemecahan secara demokratis. Pemahaman demokratis lebih diartikan sebagai kebebasan dalam melakukan tindakan tanpa berpikir dampaknya dan dapat merugikan orang lain.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dirumuskan oleh pemerintah dalam rangka mendorong tumbuh berkembangnya partisipasi aktif masyarakat, yang salah satunya adalah adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk keberlanjutan dan pembenahan Program Instruksi Presiden dalam Pembangunan Desa (INPRES BANGDES).

Keyword: *Kepala Desa, Pemberdayaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)*

PENDAHULUAN

Peran atau peranan dalam konsep manajemen merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Hal ini sebagaimana pengertian peran atau peranan yang dikemukakan oleh Miftah Thoha, bahwa peran atau peranan menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang manajer didalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Istilah peranan kita pinjam dari panggung teater untuk menjelaskan apa saja yang bisa dimainkan oleh seorang aktor. Manajer memainkan peranannya sebagai kewajiban yang tidak boleh harus dimainkan. (Miftah Thoha, 1983 : h. 195).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak serta kewajiban berdasarkan suatu tugas tertentu, bila seseorang melaksanakan fungsinya atau melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau fungsi pokoknya yang sesuai dengan peraturan yang ada maka berarti telah menjalankan

peranannya, seseorang harus disesuaikan dengan wewenang yang ada pada dirinya. Dengan demikian dalam pelaksanaan perannya, pimpinan dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari teknik dan gaya kepemimpinannya disamping faktor situasi dan kepengikutan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa merupakan pemimpin dan penanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pada struktur tata pemerintahan di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah Otonom yang paling tua. Desa didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya Negara-Negara (Kerajaan) oleh karena itu, desa mempunyai hak otonomi penuh. Kekuasaan itu tidak berisi pemerintahan dalam arti sempit, akan tetapi juga berisi pemerintahan dalam arti luas, sebab desa juga berkuasa atas pengadilan, perundang-

undangan, kepolisian dan juga pertahanan. Jadi daerah desa mempunyai otonom yang sangat luas dari daerah-daerah yang lebih besar yang didirikan dikemudian hari.

Dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa, kebijakan-kebijakan yang bersifat mengatur dan membebani masyarakat desa dirumuskan dalam musyawarah desa, yaitu Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa, antara lain Peraturan Desa tentang Program Kerja Tahunan Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Desa yang lainnya.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan, untuk perencanaan pembangunan yang bersifat rutin, dirumuskan bersama-sama dengan perangkat desa, sedangkan untuk perencanaan pembangunan yang bersifat fisik, direncanakan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau nama lain setelah mendengar dan mempertimbangkan usulan-usulan dari unsur-unsur tokoh masyarakat mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT). Hasil rumusan perencanaan itulah yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Program Kerja Tahunan Desa yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pemberdayaan masyarakat desa serta partisipasi masyarakat dalam mekanisme pemerintahan desa dapat terwujud, apabila Kepala Desa dalam menerapkan kepemimpinan, selalu mengacu pada proses dan mekanisme yang melibatkan masyarakat desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan alasan : (a). Penelitiannya sederhana karena hanya mengambil beberapa kelompok dari responden. Pengambilan data bisa didapatkan dengan cepat karena penulis dapat langsung bertanya kepada responden dan dengan mudah dapat membuat gambaran secara keseluruhan sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan cepat. (b). Dalam penelitian ini menggunakan non hipotesis yang berarti bukan untuk mencapai tujuan pembuktian hipotesa (dugaan sementara) sebagai bentuk rumusan masalah, dengan kata lain dalam penulisan ini tidak menggunakan hipotesis.

Dalam analisa data hanya mendeskripsikan informasi apa adanya mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada,.

Fokus penelitian pada dasarnya adalah untuk memberikan batasan tentang apa yang menjadi pokok perhatian dalam penelitian atau sebagai pusat bahasan yang akan dipakai sebagai dasar untuk menggali data di lapangan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah serta membuktikan tujuan penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga masyarakat Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 726 KK yang terbagi dalam 3 Dusun, 3 RW, 11 RT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Persiapan Program ADD

Berdasarkan data hasil penelitian baik dari wawancara dengan responden maupun laporan kegiatan pelaksanaan ADD, dapat dikemukakan, bahwa pemberdayaanh LPMD melalui program ADD di desa Ngraho Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, telah dilibatkan dan terlibat secara aktif.

Dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi program ADD yang dilaksanakan oleh Kepala

Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu telah terlaksana dengan baik.

b. Perencanaan Program ADD

Dari gambaran tabel 15, jelas kiranya bahwa Tim Pelaksana sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam kegiatan perencanaan yaitu dengan menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sesuai dengan pedoman dan berdasarkan musyawarah desa. Dengan demikian dapat dikatakan Pelaksanaan kegiatan Perencanaan program ADD tahun 2012 di desa Ngraho cukup baik.

Organisasi pengelolaan program ADD di tingkat Desa bentuk, susunan dan personilnya serta mekanisme penetapannya sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan program ADD kabupaten Bojonegoro dan sudah memberdayakan pengurus LPMD. Organisasi pelaksanaan program ADD di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, berdasarkan hasil penelitian sudah sesuai dengan ketentuan.

c. Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Kegiatan pencairan dana dan penyaluran dana ADD. Mekanisme pencairan dana ADD tahun 2012 di desa Ngraho sesuai dengan Pedoman Umum Pelaksanaan ADD.

d. Pelaksanaan Kegiatan Program ADD

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dari program ADD, berdasarkan hasil kajian data dan informasi dapat dikemukakan bahwa untuk swadaya atau partisipasi masyarakat yang berupa tenaga mestinya tidak hanya 5 (lima) orang tetapi bisa lebih, paling tidak hingga 10 (sepuluh) orang per hari. Hal ini mengingat berdasarkan data mata pencaharian, warga masyarakat Desa Ngraho banyak yang tidak mempunyai

pekerjaan tetap, sehingga menurut pengamatan peneliti banyak warga masyarakat yang berada di rumah. Padahal apabila yang bersangkutan digerakan untuk melakukan gotong royong dalam pembangunan fisik Desa dalam pelaksanaan program ADD, yang bersangkutan tetap mendapatkan imbalan walaupun nilainya lebih rendah sebagai bentuk kompensasi gotong royong. Sehingga hal itu sebagai tambahan sumber mata pencaharian. Kondisi ini terjadi karena kurangnya motivator dari Aparat Pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat sebagai pendorong gerakan masyarakat belum optimal.

Apabila dianalisa lebih jauh, ternyata dalam pelaksanaan ADD, seolah-olah adalah gawenya Kepala Desa dan Tim Pelaksana, sedangkan organ-organ lain lebih bersifat menunggu apa yang dikatakan oleh Kepala Desa.

Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan, pelaporan dan evaluasi berdasarkan data dan informasi yang dipaparkan pada bahasan data penelitian, dapat dikatakan baik.

Berdasarkan berbagai analisa tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan program ADD di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu dapat dikatakan berjalan dengan baik, tetapi masih kurang optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi hasil penelitian, maka dapat disimpulkan, bahwa Pemberdayaan LPMD melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu telah terlaksana dengan baik.

Organisasi pelaksana program ADD yaitu Tim Pelaksana di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, berdasarkan hasil penelitian sudah sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan ADD Kabupaten Bojonegoro tahun 2012, dan unsur-unsur masyarakat telah dilibatkan.

Dalam penyusunan rencana program ADD di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu telah diadakan musyawarah Desa yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, demikian pula dalam pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan bantuan ADD.

Namun demikian untuk swadaya atau partisipasi masyarakat yang berupa tenaga mestinya masih dapat dioptimalkan lagi, yakni dengan mengoptimalkan keterlibatan peran perangkat Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan personil dalam lembaga-lembaga Desa sebagai daya penggerak atau peran motivator pelaksanaan ADD. Bahkan seolah-olah program ADD adalah gawenya Kepala Desa dan Tim Pelaksana yang notabene LPMD, sedangkan organ-organ lain lebih bersifat menunggu apa yang dikatakan oleh Kepala Desa.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, laporan, pengawasan dan evaluasi program ADD di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu dapat dikatakan berjalan dengan baik, tetapi masih kurang optimal.

Kontribusi atau sumbangan swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan bantuan ADD dari segi kuantitas atau jumlah pemenuhan target swadaya masyarakat dapat terealisasi sesuai dengan rencana, sehingga dari segi kuantitas dapat dikatakan baik, sedangkan dari segi kualitas masih kurang optimal.

Dengan demikian dari berbagai analisa terhadap data dan informasi hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Ngraho dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Sedangkan dalam pelaksanaan program ADD Desa Ngraho Kecamatan

Kalitidu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Guna lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ADD di Desa Ngraho Kecamatan Kalitidu, dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan jadwal pelaksanaan musyawarah Desa perlu dipertimbangkan harinya, karena hal ini dapat mengakibatkan adanya ketidakhadiran undangan.

Sosialisasi sebelum dilaksanakan secara luas kepada masyarakat, perlu diadakan pertemuan terlebih dahulu dengan para tokoh masyarakat yang duduk di lembaga-lembaga LPMD dan para Ketua RW/RT, dengan harapan para tokoh tersebut memiliki kepekaan terlebih dahulu sehingga dapat berperan sebagai motivator bagi masyarakat, dalam pelaksanaan sosialisasi perlu diperluas penggunaan sarana prasarana sosialisasi, yakni melalui pamflet, edaran, pengajian ibu-ibu dan lain-lain. Harapannya tidak monoton melalui rapat-rapat formal. Hal ini disamping dapat menyebarluaskan informasi diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya pada generasi muda.

Perlu dikembangkan cara peningkatkan partisipasi masyarakat yang dikaitkan dengan kebiasaan atau budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat Desa tersebut, misalnya melalui kegiatan bersih Desa/ manganan. Desa Ngraho yang setiap tahunnya melaksanakan manganan, maka hal ini dapat dikaitkan dengan kegiatan gotong royong dan kerja bhakti, sedangkan dalam pengorganisasian pelaksanaan manganan tersebut sekaligus diperhitungkan atau ditambahkan dana swadaya untuk pembangunan Desa.

Perlu adanya peningkatan aktivitas para Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan, karena bagaimanapun juga para perangkat Desa adalah panutan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan di Desa.

Mengacu dari berbagai saran tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ngraho dapat lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- B.N. Marbun, *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*, Erlangga, Jakarta, 1988.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Cet. IX, LP3ES, Jakarta, 1985.
- C.S.T. Kansil, *Kita dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Edi Sukardi, *Makalah Diskusi Pembangunan desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Husaini Usaman dan Pramono Setiyady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. IV, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusda Karya, Bandung, 2002.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Pariata Westra, *Hubungan Kerja Kemanusiaan*, Balai Pembinaan Administrasi UGM, Jogjakarta, 1986
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, *Pedoman Pelaksanaan Dana Pembangunan Desa/ Kelurahan Kabupaten Bojonegoro*, Kantor PMD Kab. Bojonegoro, 2012.
- R.A. Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan*

Nasional, Alumni, Bandung, 1986.

- Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pusataka Pelajar, Jogjakarta, 2001.
- Soetrisno Hadi, *Methodologi Research Jilid I*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta, 1984.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Ketiga, Cetakan I, Alfabeta, Bandung, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta, 1986.
- Sukanto, *Beberapa Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, CSIS, Jakarta, 1986.
- Sumitro Maskun, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Media Widya Mandala, Yogyakarta, 1994.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi Kedua, BPFE, Jogjakarta, 1999.
- Taliziduhu Ndraha, *Peranan Pembangunan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Peraturan-peraturan
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Tim Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Badan Pemberdayaan masyarakat Desa, *Petunjuk Teknis Operasional Dana Pembangunan Desa dan Kelurahan tahun 2012*, BPMD Kab. Bojonegoro, Bojonegoro, 2012.

E- Jurnal Universitas Bojonegara